

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

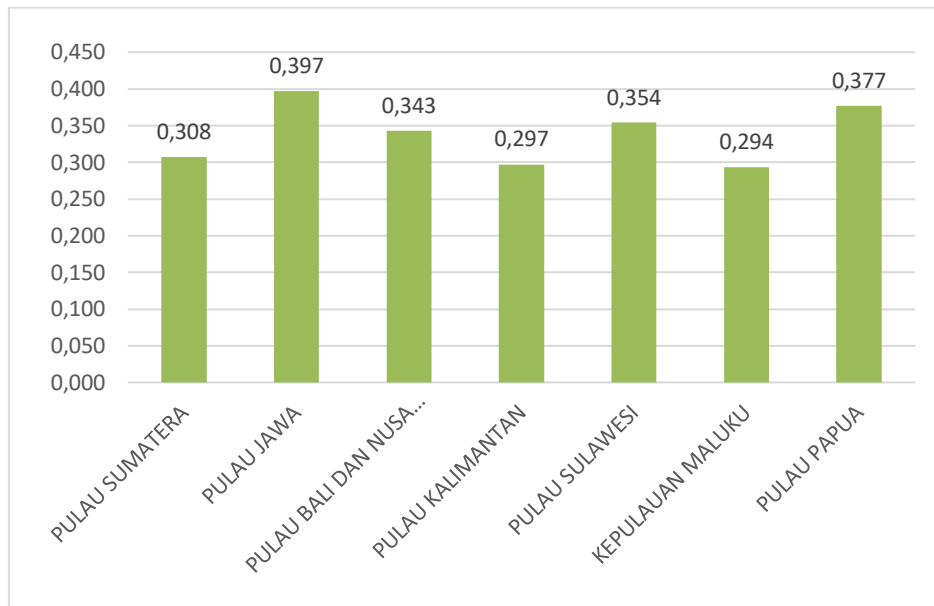
Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Padahal hakikatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam menyejahterakan rakyat, di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, di mana pertumbuhan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sering kali saling bertentangan. Jika program pembangunan lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, maka hasilnya akan tinggi, tetapi tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Sebaliknya, jika lebih mengutamakan pemerataan, distribusi pendapatan dapat membaik, namun pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Negara-negara maju telah mengadopsi strategi redistribusi dengan Pertumbuhan, yang berarti mereka dapat melakukan redistribusi pendapatan sambil menekankan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan menyerap banyak tenaga kerja (Prastiwi Indah W, 2025).

Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten,

memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan ini menciptakan variasi tingkat ketimpangan pendapatan yang menarik untuk dianalisis. Pemilihan di Pulau Jawa didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, sehingga dinamika ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan menjadi lebih kompleks. Kedua, Pulau Jawa memiliki tingkat industrialisasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, khususnya pada sektor industri pengolahan. Ketiga, terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup mencolok antar provinsi, misalnya antara daerah metropolitan seperti DKI Jakarta dengan daerah yang masih berkembang seperti DI Yogyakarta. Oleh karena itu, Pulau Jawa menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, fokus wilayah yang digunakan adalah enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Pemilihan enam provinsi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Jawa memiliki karakteristik ekonomi yang heterogen, dengan tingkat industrialisasi, urbanisasi, dan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda antar provinsi. Selain itu, Pulau Jawa juga menjadi pusat konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi nasional, sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan di wilayah ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.1 Rata-Rata Indeks Gini Pulau-Pulau di Indonesia Tahun 2024

Tingkat ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia pada tahun 2024 masih menunjukkan perbedaan yang cukup nyata. Nilai Indeks Gini antar pulau berada pada kisaran 0,294 hingga 0,397, dengan Pulau Jawa menempati posisi relatif tinggi, yaitu sekitar 0,397. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa pulau lain seperti Sumatera yang berada pada kisaran 0,308, Kalimantan sekitar 0,297, serta Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, yang relatif lebih rendah di kisaran 0,294 dan 0,343. Tingginya Indeks Gini di Pulau Jawa mencerminkan bahwa meskipun wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, distribusi pendapatan belum merata.

Ketimpangan akses di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan sektor industri masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah berkembang seperti Pulau Jawa. Akses pendidikan yang belum merata menyebabkan perbedaan kualitas sumber daya manusia, di mana individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan keterampilan dan peluang kerja. Kondisi ini

berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran atau pekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Di sisi lain, perkembangan sektor industri yang terkonsentrasi di wilayah tertentu menciptakan ketimpangan kesempatan kerja antar daerah, sehingga wilayah yang minim industrialisasi mengalami keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, terjadi lingkaran ketimpangan di mana rendahnya pendidikan mempersempit peluang kerja, sementara distribusi industri yang tidak merata memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional. Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang penting dan harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial (Ardana Yudhistira, 2018).

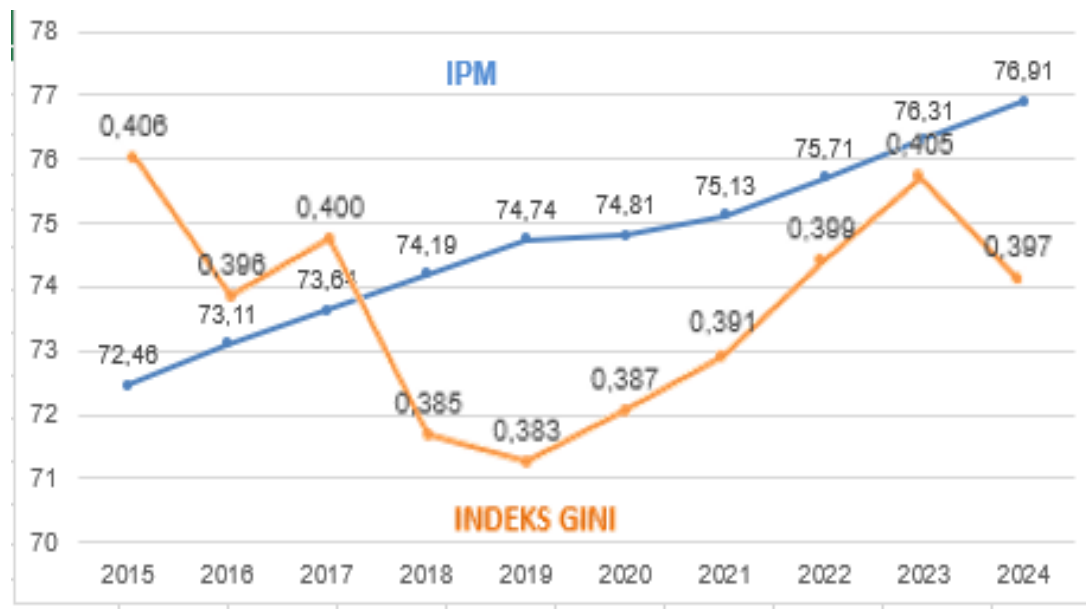
Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan pengukuran komparatif harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di dunia termasuk di Indonesia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara merupakan

negara maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Amaluis 2024).

Secara teoritis, hubungan antara IPM dan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui Teori Modal Manusia *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh (Gary Becker), Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan modal yang dapat ditingkatkan melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu, sehingga secara teoritis dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Becker, 1964). Teori modal manusia dari (Gary Becker) juga dijelaskan dalam penelitian Ardiani & Prabowo (2024) manusia bukan hanya bertindak sebagai sumber daya tetapi dapat berbentuk sebagai modal, oleh karena itu manusia memiliki potensi untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Pendidikan, keterampilan, kesehatan merupakan salah satu bentuk kontribusi atau usaha dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, menurut teori kapabilitas *Capability Approach* (Amartya Sen) pembangunan merupakan proses perluasan kebebasan dan kemampuan (capabilities) individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Kemampuan tersebut diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi tidak merata. Dijelaskan juga dalam penelitian

(Gumelar & Qomar, 2025) pembangunan harus ditujukan pada peningkatan kemampuan individu dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, serta kesempatan sosial yang memadai. Apabila terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi, maka akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya dan layanan dasar menjadi tidak merata. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2026)

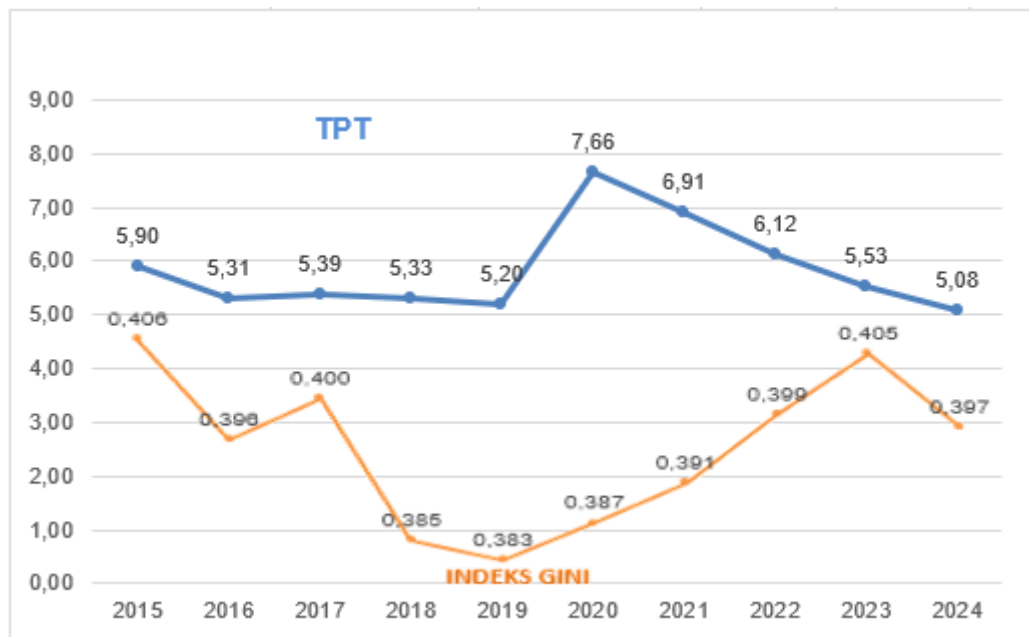
Gambar 1.2 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini di Pulau Jawa Tahun 2015-2024

Dapat dilihat IPM menunjukkan tren meningkat dari 72,48 pada tahun 2015 menjadi 76,91 pada tahun 2024, yang menandakan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, peningkatan IPM tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan Indeks Gini. Sebagai contoh, pada periode

2019-2023, IPM meningkat dari 74,74 menjadi 76,31, tetapi Indeks Gini justru naik dari 0,383 menjadi 0,405, yang menunjukkan pelebaran ketimpangan pendapatan. terlihat bahwa hubungan keduanya tidak sejalan dengan teori modal manusia yang menyatakan bahwa peningkatan IPM seharusnya menurunkan ketimpangan pendapatan.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran dapat terjadi karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Selain itu, kemampuan penyerapan tenaga kerja yang masih relatif rendah turut memperparah kondisi ini. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang belum mampu menampung seluruh tenaga kerja yang siap bekerja (Wardiansyah M, 2017).

Menurut Teori Neoklasik Distribusi Pendapatan dijelaskan oleh (Todaro & Smith, 2011) pendapatan individu ditentukan oleh kepemilikan faktor produksi, terutama tenaga kerja. Individu yang tidak bekerja (menganggur) tidak memperoleh pendapatan dari tenaga kerja, sehingga menyebabkan perbedaan pendapatan antara kelompok yang bekerja dan yang tidak bekerja, yang pada akhirnya memicu ketimpangan distribusi pendapatan.



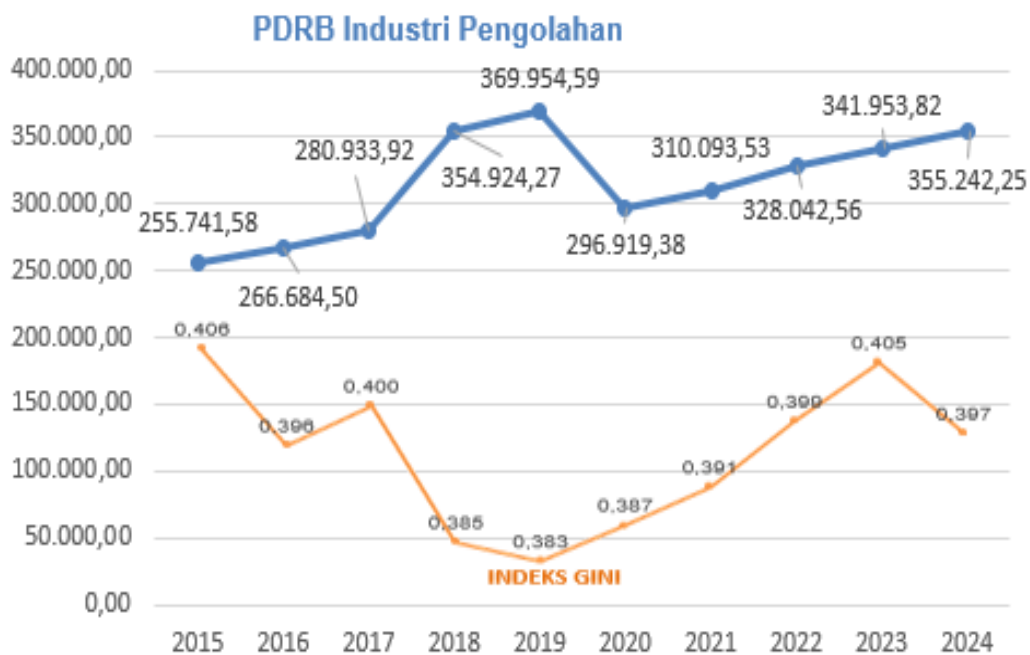
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.3 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini di Pulau Jawa
Tahun 2015-2024

Berdasarkan grafik tahun 2015-2024 terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada periode 2015-2019, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020, dan kembali menurun hingga 2024. Sementara itu, Indeks Gini juga menunjukkan pola yang tidak konsisten, di mana sempat menurun hingga 2019, lalu meningkat kembali pada periode 2020-2023 sebelum sedikit menurun di 2024. Namun, perubahan TPT tidak selalu diikuti oleh perubahan ketimpangan yang searah dengan teori. Misalnya, pada periode 2021-2023 ketika TPT mengalami penurunan cukup signifikan dari sekitar 6,91 menjadi 5,53, Indeks Gini justru meningkat dari sekitar 0,391 menjadi 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori distribusi pendapatan.

Variabel terakhir yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah PDRB sektor industri pengolahan. Menurut teori Dualisme yang dikembangkan oleh W. Arthur Lewis menjelaskan bahwa perekonomian negara berkembang terdiri dari dua sektor utama: sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan sektor modern dengan produktivitas tinggi. Perubahan struktur ekonomi terjadi ketika tenaga kerja surplus dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri yang lebih produktif, menciptakan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Lewis, 1954).

Model dua sektor Lewis dalam (Tri Nugraha, 2023) juga dijelaskan bahwa perpindahan surplus tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri yang diikuti dengan urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori tersebut PDRB industri pengolahan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan apabila pertumbuhan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian atau ke sektor industri dengan tingkat upah yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2026)

Gambar 1.4 Rata-rata PDRB industri Pengolahan dan Indeks Gini di Pulau Jawa
Tahun 2015-2024

Berdasarkan grafik tahun 2015-2024 terlihat bahwa PDRB industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan secara umum, terutama setelah tahun 2020 hingga mencapai lebih dari 355 ribu miliar pada 2024. Namun, kenaikan tersebut tidak selalu diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Justru pada periode 2021-2023, ketika PDRB industri pengolahan meningkat cukup signifikan, Indeks Gini juga mengalami kenaikan dari sekitar 0,391 menjadi 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan konsep teori yang menemukan bahwa PDRB industri pengolahan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat

Pengangguran Terbuka dan PDRB industri Pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan masih menunjukkan hasil yang beragam, baik dari segi arah hubungan maupun tingkat signifikansinya. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada cakupan nasional atau wilayah tertentu, sehingga belum secara mendalam mengkaji kondisi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Padahal, Pulau Jawa memiliki karakteristik ketimpangan pendapatan yang khas akibat tingginya konsentrasi aktivitas industri, proses urbanisasi yang masif, serta perbedaan struktur pasar kerja antarprovinsi.

Penelitian-Penelitian sebelumnya masih menyisakan celah penelitian (research gap), khususnya terkait perbedaan cakupan wilayah, rentang waktu pengamatan lebih terbaru yaitu sampai 2024, serta keterbatasan kajian yang mengombinasikan variabel ketenagakerjaan dan pembangunan manusia secara simultan dalam satu model analisis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB industri Pengolahan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2015-2024” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih komprehensif mengenai masalah ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa serta menjadi upaya untuk menjelaskan perbedaan hasil temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024?

3. Bagaimana pengaruh PDRB Industri Pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB Industri Pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan akademik, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan permasalahan ketimpangan pendapatan. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan serta metode analisis kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menginterpretasikan hasil penelitian serta mengaitkannya dengan kondisi empiris pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Jawa.

2. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah di provinsi-provinsi Pulau Jawa, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan pendapatan antarprovinsi. Dengan adanya bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, instansi terkait diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Trunojoyo Madura, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, sebagai tambahan referensi dan bahan kajian ilmiah dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian akademik yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dan permasalahan pembangunan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura dalam melakukan penelitian selanjutnya, serta mendukung peningkatan kualitas akademik dan reputasi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan isu pembangunan daerah.